

## **BAB II**

### **DINAMIKA KASUS PERDAGANGAN SAMPAH ILEGAL DARI KANADA KE FILIPINA**

Bab II menjadi penting untuk memberikan gambaran umum terkait dengan variabel yang menjadi subjek penelitian. Konteks yang digambarkan pada bab ini tersusun dari lima bagian. (1) Penulis terlebih dahulu mengulas secara mendalam mengenai dinamika dan catatan kasus perdagangan sampah ilegal yang pernah terjadi di Asia Tenggara. (2) Penjelasan mengenai perdagangan sampah ilegal di Filipina. (3) Pembahasan spesifik berisikan penjelasan dinamika daripada kasus perdagangan sampah ilegal dari Kanada ke Filipina. Mulai dari awal mula kasus, penyelidikan, dan penanganannya. Hingga sampai kepada tahap sengketa yang melibatkan pemerintah Kanada dan pemerintah Filipina. (4) Pembahasan mengenai upaya penyelesaian kasus tersebut dari sisi kedua pemerintahan yang tidak kian kunjung menemui titik penyelesaian. (5) Penjelasan respon aktor non negara dalam menyikapi kasus ilegal tersebut dan upaya penyelesaian yang telah dilakukan, baik oleh Kanada dan Filipina.

#### **2.1 Dinamika Perdagangan Sampah Ilegal Di Asia Tenggara**

Perdagangan sampah bermula sejak tahun 1970-an seiring dengan semakin berkembangnya aktivitas industri secara global. Meningkatnya pertumbuhan industri ini kemudian berbanding lurus dengan semakin banyaknya sampah yang dihasilkan dari aktivitas tersebut (Raashed, 2020). Namun, berbanding terbalik dengan semakin banyaknya jumlah sampah yang dihasilkan, negara maju mulai menerapkan standar lingkungan ketat dengan meningkatkan biaya pengelolaan dan

pembuangan sampah (Wynne, 1989, 120-146). Hal ini mendorong banyak industri di negara maju berusaha untuk mencari cara lain dalam mengelola sampah mereka dengan harga yang lebih ekonomis dan tetap meningkatkan keuntungan. Salah satunya melalui pengiriman sampah tersebut secara lintas batas (luar negeri) ke negara-negara berkembang (*less developed*).

Terdapat beberapa faktor yang menjadikan negara-negara berkembang sebagai destinasi utama dari perdagangan sampah global. Pertama, negara-negara berkembang secara signifikan belum memiliki standar lingkungan yang tinggi dan lemahnya pengaturan infrastruktur (Wynne, 1989). Kedua, biaya pengelolaan sampah (daur ulang, pengolahan lebih lanjut, pembuangan) di negara berkembang masih tergolong dalam kategori rendah. Sebagai contoh, biaya pembuangan satu ton sampah berbahaya di Afrika pada akhir tahun 1980-an adalah antara \$US2,50 dan \$US50, sedangkan di negara-negara maju dan negara anggota OECD berkisar antara \$US100 hingga \$US2000. Selain itu, biaya tenaga kerja di negara berkembang tergolong rendah dengan perbandingan biaya tenaga kerja di negara-negara industri lima hingga 50 kali lebih tinggi (Krueger, 2001). Akibatnya, pertimbangan biaya ini menjadi pilihan ekonomis bagi industri di negara maju untuk mengelola sampah mereka ke negara berkembang.

Di samping itu, negara-negara berkembang (*global south*) juga menerima sampah tersebut atas dasar faktor ekonomi (Nazar, 1995). Mengingat sampah bukan lagi menjadi residu yang sama sekali tidak berguna, tetapi juga menjadi komoditas berharga (Bisschop, 2016). Bahkan, sampah yang tergolong sampah berbahaya (*hazardous waste*) pun memiliki potensi nilai sebagai bahan mentah sekunder yang

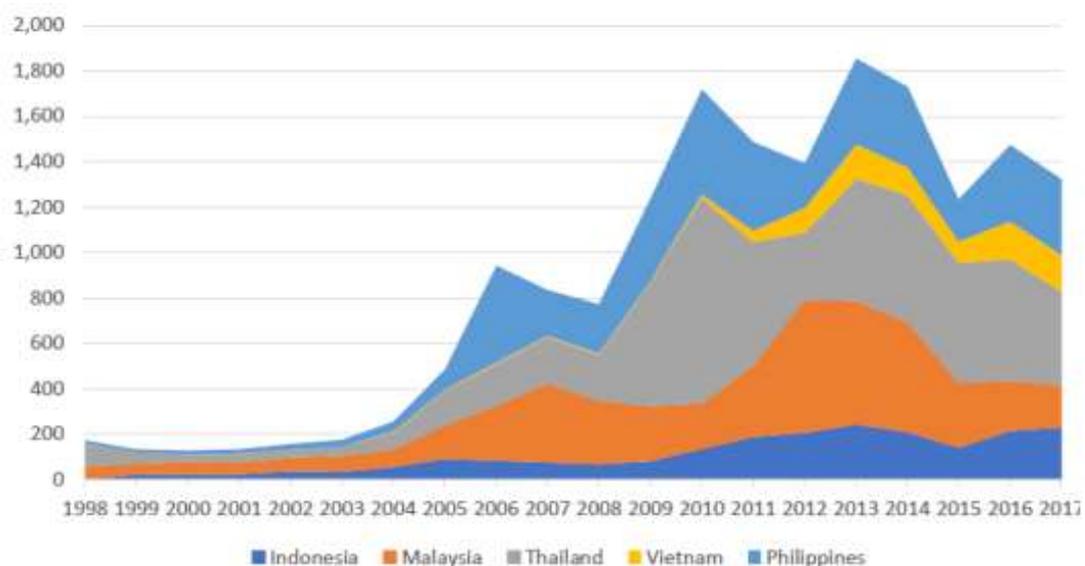
dapat diperoleh kembali, digunakan kembali, ataupun didaur ulang (Krueger, 2001). Hal ini kemudian menjadi alternatif dalam proses produksi industri ketika sumber daya alam semakin terbatas. Namun, lambat laun perdagangan sampah global yang melibatkan pengiriman sampah lintas batas menjadi permasalahan serius.

Perdagangan sampah menjadi celah bagi negara-negara maju untuk melakukan pembuangan sampah berbahaya secara ilegal (*illegal toxic dumping*) ke negara-negara berkembang (Krueger, 2001). Pembuangan sampah dikatakan ilegal apabila dalam prosesnya tidak mendapatkan izin dari otoritas atau izin legal dari kawasan terkait yang akan menjadi tempat pembuangan. Lalu, sampah berbahaya dalam konteks ini merupakan jenis sampah yang memiliki karakteristik radioaktif, mudah meledak, dan korosif atau beracun. Selain itu, material sisa proses produksi bahan kimia dan yang terkontaminasi dioksin dan logam berat, seperti merkuri, kadmium, timbal, hingga limbah organik juga termasuk dalam kategori sampah berbahaya (Bisschop, 2016). Sampah-sampah berbahaya tersebut kemudian dibuang secara sembarangan tanpa mempertimbangkan persetujuan otoritas setempat dan kemampuan negara penerima dalam mengolah sampah berbahaya tersebut. Ditambah lagi, sampah yang dikirimkan tersebut kerap kali merupakan jenis sampah yang tidak bisa didaur ulang sama sekali dan justru membahayakan kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan.

Adapun arus perdagangan sampah global secara ilegal seringkali melibatkan negara-negara berkembang yang terletak di beberapa regional, salah satunya adalah Asia Tenggara (Nazar, 1995). Sebelum dibuatnya Konvensi Basel

pada tahun 1992 yang mengatur dan mengurangi pergerakan sampah berbahaya lintas batas, khususnya dari negara OECD<sup>1</sup> ke negara-negara berkembang, sebagian besar negara di Asia tidak memiliki undang-undang mengenai pembuatan, pembuangan, dan pengolahan sampah (Hernandez, 2019). Sehingga banyak negara-negara berkembang di Asia Tenggara yang kemudian menjadi sasaran dari pengiriman sampah secara ilegal.

**Grafik 2.1. Kuantitas (milyar kilogram) Impor Sampah Plastik Beberapa Negara di Regional Asia Tenggara (1998 - 2017)**



Sumber: (Sembiring, 2019)

Lebih lanjut, terjadinya pengiriman sampah ilegal di Asia Tenggara tidak terlepas dari beberapa negara di regional tersebut yang memang secara aktif

<sup>1</sup> OECD merupakan organisasi internasional yang berfokus pada kerjasama ekonomi dan pembangunan internasional yang didirikan pada 14 Desember 1960. OECD terdiri dari 38 negara yang termasuk dalam kategori negara maju dan memiliki penghasilan ekonomi yang tinggi.

mengimpor sampah plastik. Hal ini mendorong terjadinya penyelundupan sampah berbahaya dan sampah residual berkedok pengiriman sampah plastik ke negara-negara di Asia Tenggara. Berdasarkan grafik 2.1., data United Nations Commodity Trade Database (UNTAD) menunjukkan bahwa terdapat lima negara di regional Asia Tenggara yang menjadi pengimpor terbanyak dibandingkan dengan negara-negara lainnya di regional yang sama. Diantaranya adalah Filipina, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Adapun Filipina merupakan negara importir sampah plastik tertinggi di Asia Tenggara sejak tahun 1998 hingga 2017 dengan kuantitas tertinggi 1.800 milyar kilogram (Sembiring, 2019). Secara keseluruhan, Filipina mengimpor jumlah sampah yang lebih banyak dibandingkan dengan empat negara lainnya yang juga mengimpor sampah plastik secara global, yaitu Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Vietnam. Hal ini kemudian menjadi celah untuk sampah-sampah berbahaya pada akhirnya di selundupkan dan dikirimkan ke Filipina melalui perdagangan sampah, khususnya melalui jalur ilegal.

## **2.2 Perdagangan Sampah Ilegal di Filipina**

Filipina merupakan negara yang mulai menerima impor sampah sejak tahun 1980-an. Bergabungnya Filipina sebagai negara pengimpor dalam praktik perdagangan sampah global tidak terlepas dari sejarah krisis finansial yang terjadi di Filipina pada tahun 1970-1980 (Backer, 2021). Antara tahun 1981 dan pertengahan tahun 1987, perekonomian Filipina menghadapi krisis besar di sektor keuangan. Mulai dari bangkutnya tiga bank umum, 128 Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan 32 lembaga penghematan serta intervensinya 2 bank swasta di Filipina (Nascimento, 1991). Selain itu, kedua bank komersial terbesar di bawah naungan

pemerintah, yaitu, Bank Nasional Filipina dan Bank Pembangunan Filipina, secara *de facto* mengalami kebangkrutan. Krisis finansial ini kemudian menyebabkan posisi politik dan ekonomi Filipina menjadi lemah di pasar global. Akibatnya, dengan adanya perdagangan sampah sebagai alternatif pendapatan membuat Filipina kemudian menjadi tujuan akhir pembuangan sampah bagi negara-negara lain yang memiliki status ekonomi lebih kuat (Backer, 2021).

Akan tetapi, sejak Filipina membuka gerbang impor sampah secara global, Filipina perlahan menjadi tempat pembuangan sampah yang bermasalah. Hal ini dikarenakan kapasitas dan manajemen pengelolaan sampah yang kurang efisien sehingga menyebabkan penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir, risiko kesehatan manusia, dan tercemarnya lingkungan (Talentino et al., 2004). Terlebih lagi, manajemen pengolahan jenis sampah berbahaya di Filipina masuk dalam kategori jauh dari layak karena (DENR et al., 1993):

1. Tidak adanya strategi terpadu dalam pengelolaan sampah
2. Fasilitas dan peralatan yang tidak memadai dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, khususnya di tingkat lokal dan masyarakat dalam menangani bahan kimia beracun dan limbah berbahaya
3. Kurangnya inventarisasi yang memadai mengenai timbulan dan pembuangan limbah B3<sup>2</sup>
4. Tidak adanya atau kurangnya koordinasi antar lembaga dan kekhususan operasional dalam peraturan yang akan ditegakkan

---

<sup>2</sup> Limbah B3 merupakan singkatan dari Limbah dengan Bahan Beracun dan Berbahaya

5. Kurangnya penekanan pada peraturan dan penegakan hukum sebagai komponen penting dalam keberhasilan pengelolaan perkotaan dan lingkungan hidup
6. Rendahnya kesadaran pekerja dan masyarakat umum mengenai bahaya dan potensi risiko yang terkait dengan limbah B3

Ditambah lagi dengan beberapa industri di Filipina yang juga mengimpor sampah beracun sebagai bahan sekunder produksi justru membuang limbah di tempat terbuka tanpa pengolahan lebih lanjut. Adapun sampah beracun di Filipina pada tahun 1990an kemudian justru ditangani melalui berbagai cara di antaranya (DENR et al., 1993; (Talentino et al., 2004; (Backer, 2021):

1. Pembuangan langsung limbah cair dari saluran pembuangan industri ke aliran air seperti Sungai Pasig
2. Penyimpanan dan/atau penguburan di lokasi industri atau tanah milik atau disewakan oleh industri
3. Pengumpulan dengan kapal tanker dan selanjutnya dibuang ke pembuangan limbah padat seperti *Smokey Mountain*<sup>3</sup>
4. Pengumpulan dengan kapal tanker dan selanjutnya dibuang ke lahan terbuka seperti lahan pertanian
5. Pengumpulan dengan kapal tanker dan pembuangan ilegal ke selokan atau saluran pembuangan

---

<sup>3</sup> *Smokey Mountain* merupakan TPA terbesar di Filipina yang terletak di Tondo, Manila yang telah resmi ditutup oleh Pemerintah Filipina pada tahun 1995. Kini, *Smokey Mountain* telah beralih fungsi menjadi kawasan perumahan umum bagi masyarakat miskin.

Metode penanganan sampah beracun di Filipina yang sedemikian rupa kemudian semakin diperparah dengan adanya impor sampah beracun yang justru masuk ke Filipina melalui jalur ilegal. Dalam (Bisschop, 2016), dijelaskan bahwa perdagangan sampah beracun secara ilegal dilakukan melalui berbagai cara. *Pertama*, pengirim sengaja memalsukan keterangan sampah (klasifikasi sampah) dari sampah berbahaya menjadi jenis sampah yang dapat diperdagangkan secara legal sesuai dengan ketentuan Konvensi Basel<sup>4</sup> sehingga dapat sampai ke tempat tempat tujuan. *Kedua*, wujud sampah berbahaya yang disamarkan dengan cara ditumpuk dengan sampah jenis lain di atasnya sehingga tidak terdeteksi. Adapun teknik lain dengan menyembunyikan sampah berbahaya di belakang barisan komoditas lain sehingga ketika kontainer dibuka, bagian pengecekan Bea Cukai hanya melihat barang-barang lainnya. Walaupun telah terdapat teknologi sinar X-ray yang dapat mendeteksi sampah berbahaya di kontainer, tetapi di sebagian besar pelabuhan hanya sedikit kontainer yang dapat dipindai, mengingat volume perdagangan yang besar dan arus perdagangan yang ramai. *Ketiga*, banyak pengirim sampah ilegal yang sengaja tidak melengkapi formulir *Custom Declaration*<sup>5</sup> atau mengisi informasi kontak dengan kontak yang salah untuk menghalangi pengecekan atau kontrol dari pihak berwenang terkait sampah yang dikirimkan. Beberapa taktik ini kemudian yang menyebabkan sulitnya untuk melacak ekspor impor sampah secara ilegal yang masuk ke dalam sebuah negara.

---

<sup>4</sup> Konvensi Basel merupakan Konvensi Internasional yang dibuat pada tahun 1990 yang mengatur dan mengurangi pergerakan sampah berbahaya lintas batas, khususnya dari negara OECD ke negara-negara berkembang.

<sup>5</sup> *Custom Declaration* merupakan dokumen legal oleh Bea Cukai dalam perdagangan lintas batas yang berisikan detail dari komoditas yang diekspor maupun diimpor.

Lebih lanjut, sebagian besar negara-negara berkembang termasuk Filipina tidak memiliki sumber daya dan teknologi yang cukup untuk mampu melacak seluruh perdagangan sampah ilegal yang ada (Ray, 2008); (Backer, 2021). Sulitnya melacak jalur perdagangan sampah ilegal juga dikarenakan kapal yang terlibat mencoba membingungkan pihak berwenang dengan melakukan *port hopping*. *Port hopping* merupakan sebuah taktik yang digunakan oleh kapal dengan cara berpindah dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya secara berulang untuk menghindari deteksi atau inspeksi yang ketat. Strategi ini bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan tertangkap dan memilih pelabuhan dengan denda terendah apabila tertangkap (Backer, 2021). Selain itu, Filipina belum memiliki sarana dan pendukung organisasi yang diperlukan untuk mengawasi dan mengontrol setiap kontainer sampah yang masuk ataupun keluar wilayah Filipina (Ray, 2008). Walaupun demikian, setidaknya terdapat beberapa kasus pengiriman sampah ilegal yang pernah tercatat di Filipina.

Pertama, kasus pengiriman sampah dari Amerika Serikat oleh eksportir Ricoh Electronics pada tahun 1987 yang mengirimkan sampah beracun dengan berlabelkan material sampah daur ulang. Kedua, masih dengan eksportir dari Amerika Serikat yaitu Recycled Energy Inc pada 1988 yang mengirimkan limbah lumpur berbahaya dengan berlabelkan material daur ulang bahan bakar padat (Backer, 2021). Ketiga, pengiriman sampah secara ilegal pada tahun 1999 melalui 120 kontainer yang dikirimkan dari Jepang ke Filipina. Kontainer-kontainer tersebut berlabelkan sampah daur ulang yang ternyata justru berisikan sampah berbahaya berupa limbah kimia dan sampah rumah sakit (IPEN, 2021). Secara

lengkap, deretan kasus pengiriman sampah ilegal ke Filipina yang pernah tercatat dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1 Catatan Kasus Pengiriman Sampah Ilegal ke Filipina**

<b>Tahun</b>	<b>Negara</b>	<b>Jenis Sampah yang Dikirimkan</b>	<b>Keterangan Label Kontainer Sampah</b>
1987	Amerika Serikat	Sampah beracun dan limbah lumpur	<i>Recyclables material</i> (material daur ulang)
1999	Jepang	Limbah kimia dan sampah beracun	<i>Recyclables material</i> (material daur ulang)
2013	Kanada	Sampah plastik yang terkontaminasi sampah campuran (sampah elektronik, sampah rumah tangga, popok bekas pakai, dan sampah elektronik bekas)	<i>Recyclable plastics</i> (plastik daur ulang)
2018	Korea Selatan	Sampah plastik yang terkontaminasi sampah campuran (popok bekas pakai, sampah elektronik, dan baterai bekas pakai)	<i>Plastic synthetic flakes</i> (serpihan sintetis plastik)
2019	Australia	Sampah bahan bakar pembakaran semen	<i>Processed engineered fuel</i> (bahan bakar rekayasa)
2019	Hongkong	Sampah elektronik dan sampah residu	<i>Assorted electronic accessories</i> (varian aksesoris elektronik)

Sumber: (IPEN, 2021); (Greenpeace & Ecowaste Coalition, 2020, 12)

Berdasarkan tabel 2.1, terdapat satu dari sekian deretan kasus perdagangan sampah ilegal yang memunculkan ketegangan diplomatik, yaitu kasus perdagangan sampah ilegal yang dikirimkan dari Kanada. Kasus ini menjadi *high profile cases* sepanjang sejarah catatan kasus perdagangan ilegal di Filipina (IPEN, 2021). Hal

ini dikarenakan kasus tersebut yang membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun untuk selesai serta dinamika kompleksnya yang menjadikan kasus tersebut disorot secara nasional dan internasional. Dengan kemudian, kasus ini menarik untuk dilihat secara runtut, baik dari kronologi dan keberlanjutan penyelesaiannya.

### **2.3 Kronologis Kasus Perdagangan Sampah Ilegal Dari Kanada Ke Filipina**

Kedatangan 103 kontainer sampah yang berlabelkan “sampah daur ulang” yang dikirimkan oleh eksportir Chronic Plastic Incorporated di Ontario, Kanada menjadi awal mula dari kasus ini. Kontainer sampah tersebut dikirimkan melalui dua termin, yaitu termin pertama mulai dari bulan Juni hingga Agustus Tahun 2013 dengan total 55 kontainer yang dikirimkan ke *Manila International Container Port* (MICP). Lalu termin kedua mulai dari Desember 2013 hingga Januari 2014 dengan total 48 kontainer yang juga dikirimkan ke MICP (Rappler, 2017). Adapun pengiriman kontainer-kontainer tersebut ditujukan kepada penerima yaitu Chronic Plastic di Valenzuela City dan Live Green Enterprises di Angeles City, Pampanga, Filipina (UN Conventions, 2019). Akan tetapi, kontainer-kontainer tersebut tidak segera diambil oleh importir yang bersangkutan. Dengan kemudian, BOC Filipina pun melakukan pembongkaran pada tanggal 21 Januari 2014 terhadap kontainer-kontainer tersebut sebagai prosedur atas pengiriman kontainer yang tidak diambil dalam jangka waktu yang lama (Rappler, 2017).

**Tabel 2.2 Keterangan Eksportir dan Importir Perdagangan Sampah Ilegal  
dari Kanada ke Filipina**

<b>Termin</b>	<b>Eksportir (Kanada)</b>	<b>Jumlah Kontainer</b>	<b>Importir (Filipina)</b>	<b>Keterangan Label Kontainer</b>
Juni 2013 - Agustus 2013	Chronic Plastic Incorporated	55	Chronic Plastic	<i>Recyclable waste</i> (sampah daur ulang)
Desember 2013 - Januari 2014	Chronic Plastic Incorporated	48	Live Green Enterprises	<i>Recyclable waste</i> (sampah daur ulang)
<b>Total</b>		<b>103</b>		

Sumber: *Diolah kembali dari* (Environmental Management Bureau, 2014)

Dalam pembongkaran tersebut, BOC menemukan beberapa kontainer yang justru berisikan campuran berupa botol plastik, tas plastik, koran bekas, sampah rumah tangga, dan pampers dewasa bekas pakai (EMB, 2014). Hal ini tentu tidak sesuai dengan keterangan kontainer tersebut yang dikirimkan dari Kanada dengan berlabelkan “sampah daur ulang”. Pengecekan yang dilakukan oleh BOC pun menunjukkan bahwa 18 kontainer yang telah dibongkar berisikan sampah plastik dan sampah campuran yang terkontaminasi. Oleh karena itu, BOC memutuskan untuk tidak membuka kontainer lainnya karena khawatir kontainer tersebut juga berisikan sampah campuran yang mengandung material berbahaya yang mana berpotensi mencemari lingkungan sekitar (Rappler, 2017).



**Gambar 2.1. Pembongkaran BOC Terhadap Kontainer Sampah yang Dikirimkan dari Kanada ke Filipina**

*Sumber: (Environmental Management Bureau, 2014)*

Pengecekan lanjutan pun dilakukan oleh DENR dan juga BOC melalui *Waste Assessment and Characterization Study (WACS)* atau studi analisis dan karakterisasi limbah pada bulan Februari tahun 2014 (EMB, 2014). Berdasarkan Undang-undang Republic Act 9003 atau *Ecological Solid Waste Management Act*, WACS merupakan identifikasi bahan penyusun limbah padat yang dihasilkan dan dibuang di suatu area. Identifikasi bahan penyusun limbah dilakukan dengan berdasarkan pada volume, persentase berat atau ekuivalen volumetriknya, jenis bahan dan sumber produksi yang meliputi limbah perumahan, komersial, industri, dan institusional (Philippine EcoGov, 2011). Adapun WACS dilakukan dalam berbagai tahap diantaranya meliputi tahap menyortir (*sorting*), pemilahan (*segregation*), dan penimbangan (*weighing*).



**Gambar 2.2 Pelaksanaan Tahap Sortir WACS Kontainer Sampah yang Dikirimkan dari Kanada ke Filipina**

*Sumber: (Environmental Management Bureau, 2014)*



**Gambar 2.3 Pelaksanaan Tahap Pemilahan (kiri) dan Penimbangan (kanan) WACS Kontainer Sampah yang Dikirimkan dari Kanada ke Filipina**

*Sumber: (Environmental Management Bureau, 2014)*

Dari hasil studi analisis dan karakterisasi limbah yang telah dilaksanakan oleh DENR, ditemukan bahwa 64% dari sampah yang dikirimkan merupakan sampah yang masuk dalam kategori sampah padat yang tidak bisa didaur ulang dan harus segera dibuang ke pembuangan lokal (Environmental Management Bureau, 2014). Berdasarkan tabel 2.3, pemilahan sampah dari 18 kontainer yang diperiksa terdiri dari jenis material sampah berupa plastik campuran daur ulang, logam campuran daur ulang, sampah elektronik, sampah pecahan gelas dan botol, dan sampah residual. Lebih lanjut, dapat dilihat bahwa sampah residual merupakan material sampah yang paling banyak ditemukan dengan total terkumpul 348.38 kilogram. Adapun sampah residual merupakan jenis sampah padat yang tidak dapat

didaur ulang dan harus dibuang secara ekologis melalui tempat pembuangan jangka panjang atau tempat pembuangan sampah sanitasi (EMB, 2016). Sedangkan untuk 34% sampah lainnya merupakan jenis sampah yang tertera pada tabel 2.3.

**Tabel 2.3 Hasil Waste Assessment and Characterization Study (WACS)**

<b>Waste Material</b>	<b>Number of Bags</b>	<b>Weight (Kg)</b>	<b>% Composition</b>
<i>Recyclable Mixed Plastics</i>	26	181.15	33.25
<i>Recyclable Mixed Metals</i>	3	12.80	2.35
<i>Electronic Waste (E-Waste)</i>	1	1.30	0.24
<i>Glass (Bottles &amp; cullets)</i>	1	1.25	0.23
<b>Residuals</b>	<b>46</b>	<b>348.38</b>	<b>63.94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>77</b>	<b>544.88</b>	<b>100.00</b>

Sumber: *Diolah dari* (Environmental Management Bureau, 2014)

Hasil WACS yang menunjukkan bahwa 64% sampah yang ada dalam kontainer merupakan sampah padat yang tidak bisa didaur ulang dan ditunjukkan segera untuk dibuang menjadi bukti bahwa pengiriman kontainer ini merupakan pengiriman ilegal. Hal ini dikarenakan pengiriman kontainer sampah tersebut telah menyalahi peraturan terkait lingkungan yang berlaku di Filipina, yaitu Republic Act 6969 (*Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990*), Republic Act 2003 (*Ecological Solid Waste Management Act of 2000*), dan DENR *Administrative Order (DAO) 2013-22* (EMB, 2014).

Republic Act 6969 merupakan undang-undang mengenai pengendalian zat beracun dan limbah berbahaya dan nuklir di Filipina yang diresmikan pada tahun 1990. RA 6969 merupakan tonggak hukum yang mengatur, membatasi, atau

melarang impor, pembuatan, pengolahan, penjualan, distribusi, penggunaan, dan pembuangan bahan kimia berbahaya dan campurannya yang menimbulkan risiko terhadap kesehatan atau lingkungan (EMB, 2021). Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur mengenai pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya dan nuklir. Dalam RA 6969, sampah berbahaya (*hazardous waste*) didefinisikan sebagai produk-produk sampingan, sampah, sisa-sisa proses pabrik atau peralatan yang terkontaminasi atau zat lain dari operasi manufaktur dan sebagai limbah konsumen dari produk yang diproduksi yang menimbulkan risiko dan/atau kerusakan yang tidak masuk akal bagi kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (Congress of the Philippines, 2009).

Adapun dalam kebijakan lebih lanjut yang masih berdasar pada RA 6969, yaitu DENR *Administrative Order* 2013-22 merupakan kebijakan amandemen dari DAO 2004-36 dan DAO 1992-29 yang juga mengatur mengenai pengelolaan sampah berbahaya yang masuk ke wilayah Filipina. Bila mengaitkan pasal dalam DAO 2013-22 dan hasil WACS kontainer sampah yang dikirimkan dari Kanada, pengiriman kontainer sampah tersebut telah menyalahi pasal 10 mengenai *Import of Recycled Materials Containing Hazardous Substances and Export of Hazardous Waste* (EMB, 2013). Dalam pasal tersebut dituliskan mengenai aturan impor sampah plastik yang menyatakan bahwa:

*“No importation of **heterogeneous** and unsorted plastic materials shall be allowed. All plastics shall have no traces of **toxic materials**.”* (Department of Environment and Natural Resources, 2014)

Dengan demikian, pengiriman kontainer sampah dari Kanada ke Filipina termasuk pengiriman yang ilegal dimana kontainer sampah tersebut tidak sesuai

dengan peraturan lingkungan yang telah ditetapkan di Filipina. Tidak hanya itu, pengiriman kontainer sampah dari Kanada ke Filipina juga telah melanggar peraturan dalam cakupan internasional, yaitu Konvensi Basel yang juga telah ditandatangani baik oleh Kanada dan Filipina pada tahun 1990an. Dalam Konvensi Basel pasal 9 Ayat 2 dinyatakan bahwa:

*“In case of a transboundary movement of hazardous wastes and other wastes deemed to be illegal traffic as the result of conduct on the part of the exporter or generator, the State of export shall ensure that the wastes in question are: (a) **taken back by the exporter or the generator or, if necessary of by itself into the State of export;** and (b) are otherwise disposed of in accordance with the provisions of this Convention **within 30 days from the time the State of export has been informed about the illegal traffic or such other period of time as States concerned may agree.** To this end the Parties concerned shall not oppose, hinder or prevent the return of those wastes to the State of Export”* (Basel Convention, 1989)

Berdasarkan pasal tersebut, tertulis bahwa perpindahan atau transfer sampah yang terbukti merupakan perpindahan sampah secara ilegal harus diambil kembali oleh eksportir atau dikirimkan ke Negara pengekspor. Selain itu, tertulis pula bahwa negara-negara yang telah menandatangani Konvensi Basel (*State Parties*) dan Pihak-pihak yang berkepentingan tidak boleh menentang, menghalangi atau menghalangi pengembalian limbah tersebut ke Negara Pengekspor (Basel Convention, 1989). Namun, pada kenyataannya permasalahan ini bukanlah tipe permasalahan yang mudah untuk segera diselesaikan. Hal ini dikarenakan kasus tersebut memiliki banyak dinamika kompleks didalamnya yang kemudian menjadikan penyelesaian kasus ini menjadi abu-abu selama 6 tahun terhitung sejak tahun 2014 hingga tahun 2019. Mulai dari inharmonisasi badan-badan pemerintah terkait di Filipina dalam penyelesaian kasus, ketidakpastian tanggung jawab

Kanada, hingga hubungan diplomasi Filipina-Kanada yang sempat berada pada tendensi tinggi akibat abu-abunya penyelesaian kasus ini.

#### **2.4 Tarik Ulur Penyelesaian Kasus Perdagangan Sampah Ilegal Dari Kanada Ke Filipina**

Setelah mengetahui kronologis kasus perdagangan sampah ilegal dari Kanada ke Filipina, maka pembahasan selanjutnya adalah mengenai upaya penyelesaian kasus tersebut. Pembahasan upaya penyelesaian kasus ini melibatkan badan-badan pemerintah Filipina (DENR, BOC, DOJ, DFA, Senat Filipina, dan Pengadilan Regional) dan bagian dari pemerintahan Kanada terkait. Adapun pembahasan upaya penyelesaian kasus diuraikan dalam alur respons dan tindakan dari tahun ke tahun untuk menunjukkan kompleksitas kasus ini.

##### **a. Alur Respon dan Tindakan Penyelesaian Kasus Pada Tahun 2014**

Setelah pengiriman sampah dari Kanada ke Filipina terbukti ilegal, segera badan-badan terkait di Pemerintahan Filipina bertindak. Dimulai oleh BOC pada Februari 2014 yang mengajukan tuntutan pidana terhadap importir kontainer sampah yaitu perusahaan Chronic Plastics. Tuntutan tersebut diajukan ke pengadilan regional atas penyelundupan sampah berbahaya yang sengaja disalah labelkan sebagai “sampah daur ulang” (Rappler, 2017). Tuntutan tersebut diberikan kepada Adelfa Eduardo, pemilik Perusahaan Chronic Plastics di Kota Valenzuela dan bagian bea cukai berlisensi Leonora Flores dan Sherjun Saldon karena telah melanggar Bagian 3601 dan 3602 dari Kode Tarif dan Bea Cukai Filipina, pasal 171 dari Revisi KUHP Filipina, dan Republic Act 6969 (Undang-Undang

Pengendalian Bahan Beracun dan Limbah Berbahaya dan Limbah Nuklir tahun 1990) (Bernal & Ranada, 2014).

Selain itu, BOC bersama dengan DENR-EMB dan DFA-EMB pada 26 Maret 2014 juga mengadakan pertemuan antar lembaga untuk segera menyusun rencana aksi penyelesaian kasus pengiriman sampah ilegal tersebut. Solusi yang diusungkan dalam pertemuan tersebut adalah meminta bantuan Pemerintah Kanada untuk prosedur yang efisien dalam pengembalian kontainer sampah tersebut ke pelabuhan Vancouver sesuai dengan peraturan Konvensi Basel (BAN Toxics, 2016). Maka dari itu, BOC melalui Kementerian Luar Negeri Filipina (*The Department of Foreign Affairs*) mengirimkan surat pertama yang berisikan permintaan bantuan kepada Kanada untuk segera mengambil kembali kontainer sampah tersebut (Rappler, 2017).

Merespon hal tersebut, Neill Reeder selaku perwakilan Kanada memberikan respon pada April 2014 sebagai berikut:

*“Canada would like to explore with the **Philippines options for processing the rest of the shipment**, in accordance with Philippine law – **in the Philippines.**”* Nail Reeder (Rappler, 2017)

Melalui pernyataan tersebut, Kanada menyatakan bahwa mereka ingin mengeksplor beberapa opsi terkait penyelesaian permasalahan tersebut. Termasuk jalan keluar mengenai nasib kontainer sampah tersebut, dengan catatan tetap sesuai terhadap peraturan yang berlaku di Filipina. Namun, pernyataan tersebut cenderung menunjukkan kesan bahwa Kanada ingin mengajukan opsi sampah-sampah tersebut untuk diproses di Filipina ketimbang dikirimkan kembali ke Kanada (IPEN, 2019). Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Kanada di atas yang menekankan ingin *“processing the rest of the shipment in the philippines”*.

Di samping itu, Geri Geronimo Sanez sebagai bagian dari DENR juga telah melakukan diskusi dengan bagian lingkungan Kanada (BAN Toxics, 2016) pada tanggal 29 Mei 2014. Diskusi tersebut menghasilkan usulan bahwa pemilik kontainer bertanggung jawab untuk memindahkan kontainer tersebut sebelum tanggal 30 Mei 2014. Adapun pemilik kontainer mencoba untuk memungkinkan kontainer sampah tersebut untuk dipindahkan ke Vietnam. Namun, sayangnya Neil Reeder selaku perwakilan Kanada pada tanggal 9 Juni 2014 menyatakan bahwa pemilik kontainer tidak dapat menemukan negara lain (*third world country*) sebagai alternatif tujuan pemindahan kontainer sampah-sampah tersebut (BAN Toxics, 2016). Lebih lanjut, Neil Reeder menyatakan bahwa Pemerintah Kanada juga tidak memiliki Undang-Undang domestik atau otoritas internasional untuk mendesak eksportir sampah tersebut, yaitu pemilik Chronic Incorporated, Jim Markis untuk mengirimkan sampah tersebut kembali ke Kanada.

*“The Government has no domestic or international authority to compel the shipper to return the shipment to Canada”* – Neil Reeder (Rappler, 2017)

Dalam konteks tersebut, hukum Kanada hanya mencakup pemberian sanksi terhadap pelanggaran undang-undang impor dan ekspor. Kanada pun tidak memiliki lingkup legalitas untuk dapat memaksa pengirim kontainer bertanggung jawab dalam mengambil kembali kontainer yang sudah dikirimkan ke Filipina. Singkatnya, Kanada tidak memiliki undang-undang yang menyediakan mekanisme untuk memaksa pengembalian kiriman ilegal ke pelabuhan asal (Rappler, 2017).

Tentu hal ini direspon kembali oleh DFA melalui surat keduanya yang dikirimkan kepada Menteri Luar Negeri Canada, Hon. John Baird pada 7 Juli 2014. Surat tersebut berisikan bahwa kontainer sampah yang berisikan sampah campuran

tersebut telah melanggar undang undang Filipina, yaitu Philippine Republic Act 6969 “*Toxic Substances, Hazardous and Nuclear Wastes Control Act of 1990*” (BAN Toxics, 2016). Surat tersebut juga menegaskan bahwa Pemerintah Filipina keberatan terhadap keberadaan kontainer tersebut di Filipina. Hal ini mengingat bagaimana kerugian yang harus ditanggung oleh Pemerintah Filipina atas kontainer tersebut. Mulai dari biaya desinfeksi pembongkaran 18 kontainer pada awal tahun 2014 yang justru berisikan sampah campuran dimana memakan biaya pemerintah sebesar P20.000 atau (\$393) (Ranada, 2014). Lalu, biaya sewa penyimpanan kontainer-kontainer (*rental cost*) tersebut di Pelabuhan Manila yang tak kunjung diambil terhitung sejak kedatangan pertama kali pada Juni 2013 hingga Januari 2015 (Rappler, 2017). Selain itu, terdapat juga *demurrage cost* atau biaya tambahan yang dikenakan oleh pemilik kapal atau operator terminal kepada pemilik kontainer jika kontainer tersebut tidak diambil atau dikeluarkan dari pelabuhan dalam jangka waktu yang telah ditentukan Adapun selama total 554 hari, kontainer-kontainer yang tidak diklaim tersebut telah menghabiskan biaya sebesar PHP 72,490,055.61 atau setara dengan (US\$ 1,611,877.61) dengan detail biaya sebagai berikut (BAN Toxics, 2016):

**Tabel 2.4 Biaya Harian Kontainer Sampah Dari Kanada di Filipina**

<b>Demurrage</b>	<b>Rental Cost</b>	<b>Canadian Waste Shipment Cost</b>
PhP 2,000 (US\$ 44.47)/day	PhP 1,080 (US\$ 15.86)/day	PhP 130,848.48 (US\$ 2,910.61/day
<b>TOTAL (554 days unclaimed)</b>		<b>PhP 72,490,055.61 (US\$ 1,611,887.61)</b>

Sumber: Ban Toxics, 2016

Selain itu, *Senate of The Philippines* juga memberikan respon terhadap kasus pengiriman sampah ilegal dari Kanada. Melalui Senate Resolution No. 919 yang diajukan oleh Senator Miriam Defensor Santiago, resolusi tersebut membahas legalisasi hukum dan peraturan untuk mencegah terjadinya lagi pengiriman sampah ilegal dari luar Filipina (Senate of The Philippines, 2015). Resolusi ini pun juga mengarah pada pembahasan ratifikasi Amandemen Konvensi Basel oleh Filipina sebagai Konvensi yang melarang total adanya perpindahan sampah secara lintas batas dari negara OECD ke negara berkembang, sekalipun untuk daur ulang. Adapun resolusi tersebut tertulis dengan inti pembahasan, *“Directing the proper senate committee to conduct an inquiry, in aid of legislation on ways to prevent illegal waste dumping from overseas in light of the botch importation of mixed hazardous garbage from Canada,”* (Senate of The Philippines, 2015).

#### **b. Alur Respon dan Tindakan Penyelesaian Kasus Pada Tahun 2015**

Setelah BOC telah melakukan gugatan kepada Adelfa Eduardo pada tahun 2014, gugatan selanjutnya diberikan kepada pemilik Live Green Enterprises, Nelson Manio (Custom Today Report, 2015). Gugatan tersebut berdasarkan pelanggaran yang dilakukan Live Green Enterprise, khususnya pada peraturan 3601 dari Kode Tarif dan Bea Cukai Filipina dan Perintah Administratif DENR (DAO) 1994-28 mengenai pedoman Impor Bahan Daur Ulang yang Mengandung Zat Berbahaya (Custom Today Report, 2015).

Adapun respon lainnya datang dari Presiden Filipina pada saat itu, Benigno Aquino III dalam menanggapi kasus ini. Bertepatan dengan kunjungan kenegaraannya ke Kanada pada bulan Mei 2015, Benigno Aquino tidak mencoba

memanfaatkan momen untuk mendiskusikan permasalahan ini secara langsung dengan PM Stephen Harper (Ecowaste Coalition, 2015). Hal ini sangat disayangkan mengingat momentum probabilitas kunjungan kenegaraannya bisa menjadi titik penyelesaian kasus ini.

Lebih lanjut, di tengah upaya penyelesaian kasus yang masih abu-abu, keadaan justru semakin diperparah dengan ditemukannya 26 kontainer sampah yang dibuang secara ilegal ke TPA Kalangitan, Capas, Tarlac pada bulan Juli 2015. Dengan 8 kontainer telah berada di lokasi menunggu untuk dibongkar serta 21 kontainer lainnya sedang dalam perjalanan menuju TPA (Farolan & Colayco, 2015). Hal ini menuai protes dari pemerintah lokal, masyarakat setempat, dan kelompok lingkungan lainnya (Ecowaste Coalition, 2015). Bahkan, terhitung dari bulan Juli hingga Oktober, juga terdapat banyak resolusi senat yang diajukan pada kongres untuk segera dilakukannya penyelidikan atas pembuangan ilegal kontainer sampah Kanada di TPA Tarlac. Diantaranya House Resolution No 2220, Senate Resolution No 1440, Senate Resolution 1446, Senate Resolution 1449, dan Senate Resolution 1461 (Senate of The Philippines, 2015); (BAN Toxics, 2016). Dengan kemudian, DFA mengeluarkan surat ketiga pada Juli 2015. Surat tersebut berisikan dua protes dengan protes pertama menyegerakan Kanada untuk segera meninjau kembali peraturan domestik mereka mengenai ekspor impor sampah. Lalu protes kedua menegaskan Kanada untuk dapat mengambil langkah tegas dengan segera mengambil kembali kontainer-kontainer sampah tersebut (Rappler, 2017). Hal ini guna menghindari dan memperparah terjadinya lagi kasus pembuangan kontainer sampah Kanada tersebut secara ilegal di TPA yang tersebar di Filipina.

Adapun permasalahan ini juga direspon Kanada, secara langsung oleh Perdana Menteri Justin Trudeau saat pelaksanaan kunjungan pertamanya ke Filipina dalam pertemuan puncak Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada bulan November 2015 (Rappler, 2017). Respon tersebut sebagai berikut:

*“Well, I think, going forward, we need to ensure that if a situation like this were to arise once again that the Canadian government has more power to actually demand action from the companies responsible. I believe there are loopholes here that were allowed to be skirted that we need to make sure we close, both for Canada’s interest and for our good relationships with our neighbors.” – PM Justin Trudeau (Rappler, 2017)*

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Kanada sadar bahwa mereka memiliki celah yang menjadi hambatan penyelesaian masalah. Mulai dari undang-undang Kanada hingga kapabilitas mereka untuk bisa menuntut tindakan dari perusahaan yang bertanggung jawab. Selain itu, Justin Trudeau juga menambahkan bahwa “*Canada Solution*” sedang dalam proses pembahasan (IPEN, 2015). Sayangnya, seruan kepada Kanada untuk membawa kembali 103 kontainer berisi sampah tidak direspon sama sekali oleh Justin Trudeau.

**c. Alur Respon dan Tindakan Penyelesaian Kasus Pada Tahun 2016, 2017, dan 2018**

Beralih ke tahun 2016, Pengadilan Regional Manila cabang 1 pun mengeluarkan putusan terkait pengiriman kembali kontainer sampah tersebut dengan biaya ditanggung oleh importir (Rappler, 2017). Kasus pengiriman sampah ilegal ini masuk dalam catatan *criminal case* dengan No. 143-11191. Putusan tersebut dikeluarkan oleh Hakim Tita Alisuag dengan berdasar pada peraturan yang dilanggar importir, yaitu Republic Act (RA) No. 6969 atau *Toxic Substances*,

*Hazardous and Nuclear Waste Control Act* (EMB, 2016). Putusan tersebut kemudian dibahas lebih lanjut pada pertemuan antar lembaga yang dilaksanakan oleh BOC. Dengan kemudian, BOC memberikan dukungan penuh atas putusan hakim dan membahas serta menyetujui langkah-langkah yang akan diambil untuk melaksanakan perintah tersebut. Adapun DFA juga menyetujui putusan tersebut dan berupaya untuk berkoordinasi kembali dengan Kanada (EMB, 2016). Namun, sayangnya putusan ini tidak terlaksana dengan importir yang nyatanya tidak mengembalikan kontainer sampah tersebut (Rappler, 2017).

Di sisi lain, Justin Trudeau kembali memberikan respon saat pelaksanaan pertemuan Leader Summit ASEAN pada November 2017 di Filipina. Justin Trudeau menyatakan bahwa:

*“Even though it originally came from Canada, we had legal barriers and restrictions that prevented us from being able to take it back,” he says. “Those regulations and those impediments have now been addressed, so it is now theoretically possible to get it back”* – PM Justin Trudeau (Rappler, 2017)

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Kanada yang masih berada dalam abu-abu hukum, kini telah menyelesaikan hambatan tersebut dan akhirnya secara teoritis kontainer-kontainer sampah tersebut dapat segera diambil. Hal ini dapat dilihat dari adanya amandemen regulasi mengenai ekspor impor sampah dan material berbahaya pada bulan Oktober 2016 yang tertera dalam *Canadian Environmental Protection Act 1999* (Government of Canada, 2016). PM Justin juga menambahkan koordinasi selanjutnya dengan pemerintah Filipina untuk mendiskusikan detail terkait siapa yang akan bertanggung jawab dalam biaya pengembalian kontainer tersebut mengingat kasus ini merupakan kasus komersial bisnis (Rappler, 2017).

Namun, hingga tahun 2018 belum ada tanda-tanda yang dilakukan oleh Kanada untuk mendiskusikan hal ini lebih lanjut dengan Filipina.

Di samping itu, Mr. Geri-Geronimo, selaku bagian EMB Filipina dalam keterlibatannya di pertemuan Konvensi Basel pada 8 September 2018 di Jenewa, Switzerland menyampaikan intervensi Filipina. Intervensi ini merupakan bentuk dukungan dalam proposal ‘*Amend Annexes II, VIII and IX of the Basel Convention*’ tentang pencantuman material plastik sebagai jenis sampah. Dengan kemudian, Filipina dan Kanada pun sepakat untuk membentuk *Technical Working Group* yang berisikan BOC, DFA, DENR, dan DOJ pada tahun 2018 untuk membahas detail mekanisme pengembalian sampah. Adapun kelompok tersebut baru akan mengadakan pertemuan pertama di kuartal pertama tahun 2019, tepatnya pada bulan Maret. Secara ringkas, alur respon dan tindakan pemerintah Kanada dan Pemerintah Filipina dalam menangani kasus perdagangan sampah ilegal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.5. Alur Respon dan Tindakan Pemerintah Kanada dan Pemerintah Filipina Dalam Menangani Kasus Perdagangan Sampah Ilegal**

	<b>Filipina</b>	<b>Kanada</b>
<b>Tahun</b>	Alur Respon dan Tindakan	Alur Respon dan Tindakan
Februari 2014	Tuntutan BOC terhadap Adelfa Eduardo, pemilik perusahaan Chronic Plastics selaku importir kontainer sampah Kanada.	-
	Tuntutan BOC terhadap broker bea cukai berlisensi, Leonora Flores dan Sherjun Saldon.	-

Maret 2014	Pertemuan antar lembaga (BOC, DENR-EMB, dan DFA-EMB) guna penyusunan <i>plan action</i> penyelesaian kasus.	-
	DFA mengirimkan surat ke Kedutaan Kanada di Filipina untuk meminta bantuan Kanada.	-
April 2014	-	Perwakilan Kanada, Neil Reeder memberikan respon dengan menyatakan Kanada ingin mengeksplor beberapa opsi penyelesaian kasus tersebut.
Mei 2014	Diskusi Geri Geronimo Sanez, DENR dengan bagian lingkungan Kanada terkait deadline pengiriman kembali kontainer ke Kanada	-
Juni 2014	-	Neil Reeder menyatakan: 1. Eksportir tidak berhasil menemukan alternatif negara lain untuk memindahkan kontainer tersebut dari Filipina 2. Kanada tidak memiliki hukum domestik maupun internasional untuk memaksa eksportir mengambil kembali sampahnya
Juli 2014	DFA mengirimkan surat kedua kepada Menteri Luar Negeri Canada, Hon. John Baird bahwa kontainer sampah Kanada tersebut telah melanggar peraturan yang berlaku di Filipina. Selain itu, surat tersebut berisikan keberatan pemerintah Filipina atas kontainer tersebut yang ada di teritorial Filipina	-
September 2014	Senator Miriam Defensor Santiago mengajukan <i>Senate Resolution</i> No. 919	-
Maret 2015	BOC menggugat importir 48 kontainer sampah Kanada, yaitu Nelson Manio, pemilik Live Green Enterprises	-
Juli 2015	DFA mengirimkan surat ketiga yang berisi protes kepada Kanada	-

Juli - Oktober 2015	Diajukannya <i>House Resolution</i> No 2220, <i>Senate Resolution</i> No 1440, <i>Senate Resolution</i> 1446, <i>Senate Resolution</i> 1449, dan <i>Senate Resolution</i> 1461 terkait insiden pembuangan ilegal di TPA Tarlac	-
November 2015	-	Respon PM Justin Trudeau terhadap penyelesaian kasus pada saat pertemuan APEC di Filipina.
Juni 2016	Putusan Pengadilan Regional Manila Cabang 1 bahwa importir bertanggung jawab mengirim kembali sampah tersebut ke Kanada dalam <i>criminal case</i> dengan No. 143-11191	-
Oktober 2016	-	Kanada melakukan amandemen regulasi mengenai ekspor impor sampah dan material berbahaya yang tertera dalam <i>Canadian Environmental Protection Act</i> 1999
November 2017	-	Respon Justin Trudeau terhadap penyelesaian kasus pada Leader Summit ASEAN
September 2018	Mr. Geri-Geronimo, selaku bagian EMB menyampaikan intervensi Filipina untuk mendukung ‘ <i>Proposal to Amend Annexes II, VIII and IX of the Basel Convention</i> ’ tentang pencantuman material plastik sebagai jenis sampah pada pertemuan yang dilaksanakan pada 8 September 2018 di Jenewa, Switzerland.	-
November 2018	Pembentukan <i>technical working groups</i>	Pembentukan <i>technical working groups</i>

---

Sumber: *Diolah kembali oleh penulis dari* (BAN Toxics, 2016); (Rappler, 2017);

(Greenpeace & Ecowaste Coalition, 2020)

Berdasarkan tabel 2.5, alur respon dan tindakan dari kedua negara bermuara pada pembentukan tim untuk menyelesaikan terkait detail pengiriman kembali kontainer sampah tersebut ke Kanada. Namun, bila kita telaah lebih jauh, alur penyelesaian kasus ini sejak awal selalu berputar pada putusan yang kemudian pada akhirnya justru tidak menyelesaikan kasus tersebut. Putusan-putusan tersebut tidak mengubah keadaan, dimana kontainer-kontainer tersebut tidak diambil kembali oleh Kanada selama bertahun-tahun lamanya dan semakin membusuk di Filipina.

Begitu pula dengan pembentukan *technical working group* pada tahun 2018 yang baru akan memulai pertemuan pertamanya di kuartal pertama tahun 2019. Hal ini kemudian terlihat seakan-akan harus melalui perdebatan panjang lagi. Mengingat kasus ini tidak kunjung selesai selama 5 tahun terhitung dari tahun 2013 hingga 2018. Merespon hal tersebut, kemudian muncul berbagai tindakan dari aktor non negara, seperti organisasi lingkungan dan kelompok masyarakat terhadap tarik ulur penyelesaian kasus ini yang tak kunjung menemukan solusi. Selain itu, organisasi lingkungan dan kelompok masyarakat sedari awal juga telah menanggapi kasus ini dengan menolak dan mendesak pengembalian sampah tersebut ke Kanada.

### **2.5. Respon Aktor Non Negara Dalam Menyikapi Tarik Ulur Penyelesaian Kasus Perdagangan Sampah Ilegal dari Kanada ke Filipina**

Kasus perdagangan sampah ilegal dari Kanada ke Filipina tidak hanya melibatkan upaya penyelesaian dari kedua negara, tetapi juga tindakan aktor non negara yang turut mendesak pengembalian sampah tersebut ke Kanada. Tindakan aktor non negara ini juga merupakan bentuk respon atas lambatnya penanganan kedua negara dalam menyikapi kasus ini yang sejatinya sudah jelas merugikan

masyarakat Filipina. Adapun aktor non negara, seperti organisasi lingkungan dan kelompok masyarakat ini menjadi katalisator dalam desakan penanganan segera kasus tersebut.

Dari awal kedatangan kontainer sampah Kanada tersebut, organisasi lingkungan dan kelompok masyarakat lainnya telah mengancam keras kasus ilegal tersebut. Salah satunya melalui pembuatan petisi *online* pada platform [change.org](http://change.org) oleh Anna Marie Kapunan, anggota Ang Nars Partylist<sup>6</sup> pada 21 Maret 2014 yang ditujukan kepada Kedutaan Kanada dan PM Justin Trudeau. Petisi tersebut dibuat bersama dengan mewakili organisasi lingkungan dan kelompok masyarakat lainnya seperti Public Services Labor Confederation (PSLINK), Ateneo School of Government (ASOG), Ban Toxics, Ecowaste Coalition, Greenpeace, Green Convergence, and Mother Earth Foundation (Change.org, 2014).

Petisi tersebut berisikan seruan untuk Kanada mengambil segera kontainer-kontainer sampahnya yang secara sengaja dibuang di Filipina (Change.org, 2014). Dimana kontainer sampah tersebut berisikan sampah campuran berupa plastik yang tidak dapat didaur ulang, popok dewasa bekas, botol dan gelas pecah, kertas bekas, limbah rumah tangga/dapur dan lainnya. Ditambah lagi dengan kondisi sampah dalam kontainer tersebut yang mulai membusuk dan berpotensi mengancam kesehatan publik serta mencemari lingkungan (Change.org, 2014). Oleh karena itu, organisasi lingkungan dan kelompok masyarakat menolak untuk Filipina dijadikan tempat pembuangan sampah Kanada yang jelas merugikan masyarakat Filipina.

---

<sup>6</sup> Ang Nars Partylist (ANP) merupakan organisasi yang mempromosikan hak-hak sosial-ekonomi politik dan profesional perawat di Filipina. ANP merupakan organisasi yang terafiliasi bersama organisasi lingkungan seperti BAN Toxics, Greenpeace, Ecowaste Coalition, dan organisasi lingkungan lainnya.



**Gambar 2.4 Petisi Organisasi Lingkungan dan Kelompok Masyarakat Filipina Mendesak Pengembalian Kontainer Sampah Kanada**

*Sumber: Change.org, 2014*

Perjuangan desakan penyelesaian kasus ilegal ini pun kemudian tertuang pada petisi tersebut yang menyerukan:

*'Pick up your imported garbage, Canada. It's the civil thing to do for a first world country like you. **NO** to Canadian garbage transboundary movement! The Philippines is **NOT** a dumping site of Canadian garbage! Kalusugan Para Sa Bayan!'* – Anna Kapunan (Change.org, 2014)

Selain mendesak Kanada untuk bertindak, petisi tersebut juga mengajukan beberapa seruan seperti mengganti rugi biaya yang telah dihabiskan oleh Pemerintah Filipina<sup>7</sup> dan kerusakan yang ditimbulkan dari adanya kontainer sampah tersebut. Petisi yang disebarluaskan tersebut kemudian berhasil mengumpulkan partisipan luas dengan total 42.334 pendukung (Change.org, 2014). Adapun hasil petisi tersebut diteruskan oleh organisasi yang berbasis di Filipina seperti, BAN Toxic, Greenpeace, ANP, Ecowaste Coalition, Mother Earth Foundation dan lainnya kepada Neil Reeder

<sup>7</sup> Lihat halaman 48

selaku perwakilan Kanada. Terdapat pula aksi demonstrasi atas kontainer sampah ilegal tersebut yang dilakukan oleh publik di Kedutaan Kanada yang berlokasi di RCBC Plaza Makati di Manila. Demonstrasi tersebut berlangsung pada tanggal 14 April 2014 (BAN Toxics, 2016).



**Gambar 2.5 Konferensi Organisasi dan Kelompok Lingkungan**

**Filipina di QCMC, Filipina**

*Sumber: Ecowaste Coalition, 2014*

Lalu di tahun yang sama tepatnya pada bulan Oktober, BAN Toxic, Greenpeace, ANP, dan Ecowaste Coalition melaksanakan konferensi di *Quezon City Memorial Circle* (QCMC) dalam merespon kasus ini. Konferensi ini merupakan bentuk penegasan terhadap DFA, DENR, dan BOC selaku badan pemerintah terkait yang menangani kasus ilegal ini. Hal ini mengingat organisasi dan kelompok masyarakat mendapati adanya perpindahan 14 kontainer oleh BOC dari yang semula berada di Pelabuhan Manila justru berada di Pelabuhan Subic pada Agustus 2014 (Ecowaste Coalition, 2014). BOC pun dalam klasifikasinya menyatakan bahwa

terdapat kesalahan dari pemindahan 14 kontainer tersebut. Walaupun demikian, hal ini tetap dikecam dan dicurigai oleh organisasi dan kelompok masyarakat sebagai bentuk upaya pembuangan permanen sampah Kanada di Filipina, khususnya di TPA Tarlac (BAN Toxics, 2016).

Lebih lanjut, organisasi dan kelompok lingkungan tersebut juga melaksanakan aksi protes di depan Kementerian Luar Negeri Filipina pada Oktober 2014. Protes tersebut dilakukan untuk mendesak DFA menyegerakan dan memproses ratifikasi konvensi internasional, yaitu *Basel Ban Amendment* untuk menghindari dijadikannya Filipina sebagai tempat pembuangan sampah berbahaya global (BAN Toxics, 2016). Selain itu, ratifikasi ini juga dapat menjadi titik terang dari kasus kontainer sampah ilegal tersebut di Filipina. Lalu juga terdapat BAN Toxics<sup>8</sup> yang memberikan respon lanjutan berupa desakan kepada pemerintah Filipina pada tahun 2015 untuk segera membentuk *Implementation and Compliance Committee*<sup>9</sup> (ICC) mengenai Konvensi Basel untuk memperkuat desakan kepada Kanada untuk mengambil kembali sampah-sampah tersebut (BAN Toxics, 2016).

Di samping itu, terdapat pula organisasi dan *public interest groups* yang sama-sama bergerak dalam isu bebas bahan berbahaya (*toxics free future*) juga mendukung desakan pengembalian kontainer sampah tersebut untuk kembali ke Kanada. Dukungan tersebut tertera pada surat pernyataan yang telah ditandatangani

---

<sup>8</sup> BAN Toxics merupakan NGO yang bergerak dalam memajukan keadilan lingkungan, kesehatan, dan pembangunan berkelanjutan di bidang bahan kimia dan limbah, dengan fokus khusus pada perempuan, anak-anak, dan sektor-sektor terpinggirkan lainnya.

<sup>9</sup> Komite yang mengelola mekanisme untuk mendorong implementasi dan kepatuhan terhadap Konvensi Basel yang tertuang pada Pasal 15, paragraf 5 dalam bagian tambahan dari Konferensi Negara Anggota Konvensi Basel yang didirikan pada tahun 2002.

63 aktivis lingkungan dari NGO yang berasal dari Argentina, Australia, Bangladesh, Belarus, Tiongkok, Kepulauan Cook, Republik Ceko, Ethiopia, Jerman, Hungaria, India, Indonesia, Pantai Gading, Kenya, Lebanon, Malaysia, Meksiko, Maroko, Nepal, Selandia Baru, Filipina, Rusia, Swedia, Swiss, Taiwan, Tanzania, Thailand, Tunisia, Uruguay, dan Amerika Serikat (Ecowaste Coalition, 2014). Dalam pernyataan tersebut, koalisi organisasi lingkungan internasional menyatakan bahwa mereka mendukung dikembalikannya sampah Kanada tersebut yang jelas telah menyalahi hukum yang berlaku di Filipina. Adapun pernyataan tersebut sebagai berikut:

*“We support the rightful stance taken by the Government of the Philippines and the environmental and zero waste groups to have **the illegal shipment returned to the sender** for contravening the country’s laws and the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal”* – International Environmentalist Statement (Ecowaste Coalition, 2014)

Dari respon-respon di atas, maka dapat disimpulkan bahwa banyak aktor non negara yang memberikan dukungan yang terfokus pada desakan kepada Kanada untuk mengambil kembali sampah-sampahnya. Mulai dari aktor non negara, baik organisasi lingkungan dan kelompok masyarakat dalam lingkup domestik hingga lingkup internasional. Namun, respon yang diberikan melalui aksi, protes, hingga demonstrasi belum cukup untuk meminta Kanada sepenuhnya bertanggung jawab. Maka dari itu, bagian selanjutnya akan membahas salah satu NGO, yaitu Ecowaste Coalition yang mana tidak hanya memberikan respon tetapi juga terlibat langsung dalam keberlanjutan penyelesaian kasus dan berkontribusi dalam memantik munculnya solusi kasus ilegal tersebut.